

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran umum objek penelitian**

Dalam penelitiannya, Asep & Wijaya (2013) mengungkapkan bahwa kota Bandung memiliki daya tarik bagi siswa yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas baik dari kota Bandung sendiri maupun luar kota Bandung bahkan sampai ke penjuru Indonesia. Daya tarik kota Bandung tidak hanya perguruan tinggi negeri tetapi banyak juga yang memilih perguruan tinggi swasta yang memiliki kualitas yang tidak jauh berberda dengan perguruan tinggi negeri yang ada di kota Bandung. Kehidupan pendidikan di kota Bandung dimulai sejak berdirinya sekolah pendidikan calon guru pribumi/*hollandsch inlandsche kweekshool* yang kemudian menjadi HIK48 pada tanggal 13 Mei 1868 oleh beberapa tokoh. Maka sejak saat itu mulai banyak didirikan sekolah-sekolah seperti *Hoof Denschool*/sekolah pendidikan calon pegawai bumiputera, *Europeessche Lagere School* dan lain-lain.

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan data berdasarkan dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk universitas atau perguruan tinggi negeri. Dan data yang terdaftar jumlah mahasiswanya adalah Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Dan menurut BPS dalam Kota Bandung Dalam Angka 2018, untuk universitas swasta yang ada di kota Bandung berjumlah 91. Sebagai gambaran dari jumlah mahasiswa kota Bandung tersebut, peneliti menggunakan sampel 10 universitas atau perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak dari universitas atau perguruan tinggi lainnya yang dijelaskan dalam tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1. 1 Jumlah Mahasiswa di 10 Perguruan Tinggi di Kota Bandung Tahun Ajaran 2017/2018**

Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia	32.787
Institut Teknologi Bandung	11.156
Universitas Islam Nusantara	6.395
Universitas Katolik Parahyangan	9.651
Institut Teknologi Nasional Bandung	9.459
Universitas Komputer Indonesia	11.630
Universitas Kristen Maranatha	9.831
Universitas Langlangbuana	4.259
Politeknik Pos Bandung	3047
Universitas Sangga Buana	3.527
Total	101.742

*Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 2018 dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*

## **1.2 Latar Belakang Masalah**

Rendahnya budaya menabung masyarakat Indonesia dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang tinggi. Dari hal tersebut pola hidup konsumtif seperti ini terjadi juga dikalangan mahasiswa, gaya hidup mahasiswa mendukung pola hidup konsumtif mereka terutama mahasiswa di kota Bandung, dimana mahasiswa

berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dari segmen *fashion*, tempat perbelanjaan, *café*, dan mall yang menjadi simbol pergaulan bagi remaja atau mahasiswa di kota Bandung. (<http://wartakota.tribunnews.com> diakses pada 20 Januari 2019)

Dalam pengambilan keputusan keuangan Senduk (2004) menjelaskan bahwa terdapat 5 keputusan keuangan yang dihadapi setiap individu. Diantaranya adalah keputusan konsumtif, kredit, menabung, proteksi, dan investasi. Sedangkan dalam keputusan keuangan tersebut, mahasiswa menghadapi keputusan konsumtif dan keputusan menabung.

Dan dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut, setiap individu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan menurut Sina (2013), ada 2 faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut yaitu pengetahuan keuangan dan sikap keuangan yang positif. Dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumtif dalam penelitian ini yang digunakan adalah faktor pengetahuan keuangan atau literasi keuangan.

Hubungan antara pengetahuan keuangan dan keputusan menabung menurut Orton (2007) adalah bahwa pengetahuan keuangan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seseorang karena pengetahuan keuangan merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi. Teori ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Byrne (2007) yang menemukan bahwa pengetahuan keuangan yang rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang salah, dan menyebabkan bias dalam pencapaian kesejahteraan di saat usia tidak produktif lagi. Selain pengetahuan keuangan, dalam pengelolaan keuangan pribadi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan menabung yaitu sikap keuangan yang diartikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pribadi.

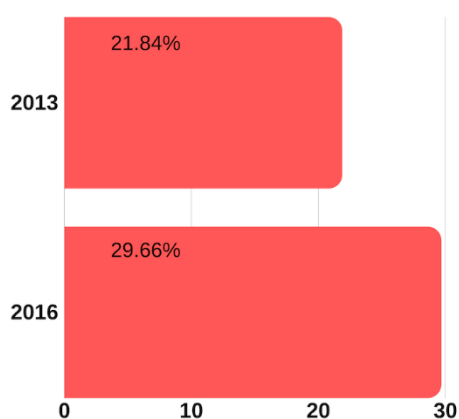
Untuk itu, dibutuhkan pengetahuan akan produk atau jasa keuangan yang seimbang dengan tingkat penggunaan produk atau jasa keuangan yang tersedia yang dapat dikelola oleh mahasiswa sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengambilan keputusan keuangan yang menyebabkan kesulitan keuangan.

Literasi keuangan atau pengetahuan keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan seperti apa yang sering terjadi pada mahasiswa khususnya di Kota Bandung. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata melainkan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*mismanagement*) seperti tidak adanya perencanaan keuangan pada kalangan mahasiswa yang sebagian besar masih mengandalkan pendapatan dari orangtuanya saja. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat yang tentunya ditunjang oleh literasi keuangan yang baik, maka taraf kehidupan diharapkan dapat meningkat, hal ini berlaku untuk setiap tingkat penghasilan, karena bagaimanapun tingginya tingkat penghasilan seseorang, tanpa pengelolaan yang tepat, keamanan finansial pasti akan sulit dicapai. (Mendari & Kewal, 2013)

Menurut OJK mengenai literasi keuangan (<https://www.ojk.go.id> diakses pada 20 Januari 2019) , pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan keuangan seluruh lapisan masyarakat yang berarti termasuk mahasiswa didalamnya, sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan (<https://www.ojk.go.id> diakses pada 20 Januari 2019)



**Gambar 1. 1 Indeks Literasi Keuangan 2013-2016**

(Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*)

Dapat dilihat dari data pada gambar 1.1, indeks literasi keuangan Indonesia dari tahun 2013 dan tahun 2016 meningkat 7.82% dari 21.84% menjadi 29.66%. Itu menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai keuangan membaik walaupun dilihat dari jarak 3 tahun dengan tingkat persentase yang terbilang cukup rendah.

**Tabel 1. 2 Indeks Literasi Keuangan Provinsi 2016**

No.	Nama Provinsi	Nama Kota/ Kabupaten	Indeks Inklusi Keuangan
1	Sumatera Utara	Medan	35,50%
2	Sumatera Barat	Padang	34,30%
3	Riau	Pekanbaru	43,10%
4	Sumatera Selatan	Palembang	34,80%
5	Kepulauan Riau	Batam	37,10%
6	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	58,40%

		Kepulauan Seribu	21,70%
7	Jawa Barat	Bandung	49,20%
8	Jawa Tengah	Semarang	44,10%
9	Jawa Timur	Surabaya	45,90%
		Malang	33,90%

(Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016)

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan persentase indeks literasi keuangan beberapa provinsi di Indonesia. Dari tabel 1.2 juga dapat dilihat tingkat indeks literasi keuangan di Kota Bandung sebesar 49,2%. Jika dibandingkan dengan kota – kota atau kabupaten lain di Indonesia, dapat dikatakan persentase yang diperoleh oleh kota Bandung sudah terbilang cukup tinggi.

Cude et al., (2006) (dalam Rasyid, 2012) menyatakan bahwa seiring berkembangnya instrumen keuangan yang tidak diiringi oleh keinginan masyarakat untuk memulai berinvestasi, diduga terjadi karena salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan. Dan hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya pengetahuan tentang lembaga keuangan yang juga bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Selain tingkat pendidikan, kondisi ekonomi juga berpengaruh dalam peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat dan juga mahasiswa. Inklusi keuangan dan literasi keuangan telah menjadi kesatuan yang tak terpisahkan serta menjadi program pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan memiliki tujuan untuk mendorong sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan agar target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% dapat tercapai pada tahun 2019. (<https://www.ojk.go.id> diakses pada 20 Januari 2019).

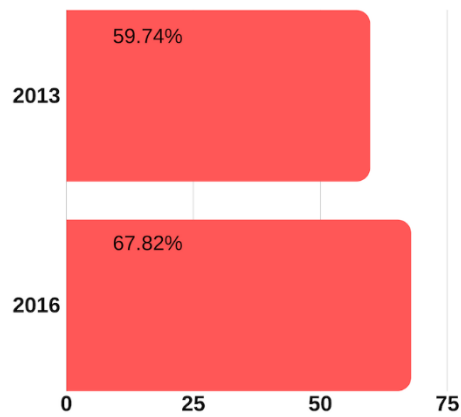
Untuk inklusi keuangan, jika dilihat dari perspektif ekonomi makro jelas memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian suatu negara dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem

keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antardaerah. Karena dengan tersedianya akses terhadap layanan keuangan, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. (<https://www.ojk.go.id> diakses pada 20 Januari 2019)

Menurut Bank Indonesia (2018) keuangan inklusif mampu memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator seperti pemerintah, dan pihak swasta yaitu antara lain: meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi *shadow banking*, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan, mendukung peningkatan *human development index*, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang *sustain* dan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu manfaat inklusi keuangan yang menyebutkan tentang mendukung stabilitas sistem keuangan ini sangatlah berguna bagi kalangan mahasiswa yang dimana dapat membantu mereka mengatur pola pengeluaran dan pemasukan harian dari biaya yang biasa mereka keluarkan.

Contohnya seperti penggunaan *fintech* pada mahasiswa yang merupakan generasi muda di Indonesia yang tentunya sudah tidak asing untuk mendengar serta menggunakan produk pendukung inklusi keuangan seperti *fintech* yang kini telah menjamur di Indonesia khususnya kota Bandung. Bahkan penggunaan *fintech* tersebut telah mendapat PDB sebesar 34,77% dan mencerminkan pasar yang dapat disasar *peer-to-peer landing* .(<https://www.duniafintech.com> diakses pada 20 Januari 2019)

Kementerian PPN (BAPPENAS) di tahun 2017 juga mendukung pernyataan OJK tersebut dimana *fintech* merupakan salah satu bentuk implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dimana menurut OJK (2017), penggunaan *fintech* juga bisa menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional.



**Gambar 1. 2 Indeks Inklusi Keuangan 2013-2016**

*(Sumber: www.ojk.go.id, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016)*

Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan di Indonesia dari tahun 2013 dan 2016 meningkat 8.08% dari tahun 2013 sebesar 59.74% naik menjadi 67.82% di tahun 2016. Dan pada tabel 1.3 dibawah menunjukkan indeks inklusi keuangan provinsi – provinsi di Indonesia. Kota Bandung memperoleh presentasi sebesar 84,1%. Dari tabel 1.2 dan 1.3 dapat dilihat bahwa indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan di Kota Bandung memiliki berada diatas indeks nasional.



**Tabel 1. 3 Indeks Inklusi Keuangan Provinsi 2016**

No.	Nama Provinsi	Nama Kota/ Kabupaten	Indeks Inklusi Keuangan
1	Sumatera Utara	Medan	70,30 %
2	Sumatera Barat	Padang	60,60%
3	Riau	Pekanbaru	73,00%
4	Sumatera Selatan	Palembang	78,30%
5	Kepulauan Riau	Batam	74,50%
6	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	80,30%
		Kepulauan Seribu	76,10%
7	Jawa Barat	Bandung	84,10%
8	Jawa Tengah	Semarang	67,70%
9	Jawa Timur	Surabaya	64,70%
		Malang	71,00%

(Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*)

Tambahan lagi, dari total 64,3 juta jiwa kelompok usia 16-30 tahun, nyatanya tidak semua kalangan muda atau mahasiswa di Indonesia melek keuangan. Berdasarkan Indeks inklusi keuangan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi mahasiswa di Indonesia baru 64,2% (<https://www.ojk.go.id> diakses pada 20 Januari 2019). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa belum begitu banyak generasi muda atau mahasiswa yang memiliki pemahaman dan menggunakan produk serta layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan atau lembaga lain. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kuat antar pemangku kepentingan atau regulator untuk terus melakukan berbagai inisiatif program dan edukasi guna menggenjot tingkat literasi dan inklusi keuangan di kalangan pemuda.

*Head of Wealth Management & Retail Digital Business Bank Commonwealth* Ivan Jaya mengatakan, menabung dan berinvestasi idealnya harus dilakukan sejak muda agar generasi muda dapat mewujudkan tujuan keuangannya di masa mendatang. Program SiMuda Investasiku merupakan salah satu contoh

program *bundling* tabungan dengan produk investasi asuransi kecelakaan diri dari Asuransi MSIG untuk generasi muda Indonesia yang diadakan oleh lembaga keuangan yang terdiri dari 8 perbankan. Kurangnya pengetahuan dan pengelolaan terhadap keuangan inilah yang menjadi hambatan penting bagi literasi keuangan. Terutama, jika masyarakatnya sendiri kurang mengetahui produk dan layanan keuangan dari lembaga keuangan itu sendiri. (okezone.com, 2017).

Pada kota Bandung, terdapat survei dari OJK pada tahun 2016 yang menunjukkan hanya 28,9% dari penduduk dewasa di kota Bandung yang memahami produk-produk perbankan, sedangkan angka tersebut masih sangat jauh dari target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan sebesar 75% yang berasal dari produk atau jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan (okezone.com, 2017). Itu berarti dapat diasumsikan bahwa masyarakat yang termasuk mahasiswa di kota Bandung masih belum memiliki ketertarikan dengan lembaga keuangan yang cukup untuk meningkatkan inklusi keuangan di kota Bandung. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian pada *The Financial Action Task Forces*, 2011 (dalam Simbara dan Dewi 2017) yaitu inklusi keuangan adalah mengenai tersedianya akses ke lembaga keuangan yang memadai secara aman, nyaman, dan terjangkau layanan keuangannya kepada masyarakat.

Laboratorium Inovasi dan Pengembangan Ilmu Perusahaan (LIPSP) ITB juga melihat kurangnya kesadaran mahasiswa kota Bandung dalam berinteraksi serta melakukan kegiatan perbankan seperti investasi kepada lembaga keuangan. Kemudian, LIPSP mengadakan suatu edukasi publik berbentuk seminar dan talkshow bertemakan "Mahasiswa Berinvestasi". LIPSP memiliki keinginan untuk mengenalkan saham sebagai salah satu bentuk investasi juga informasi mengenai lembaga keuangan itu sendiri. (itb.ac.id, 2014)

Terlebih, ternyata juga masih marak terjadi kasus investasi ilegal yang membuktikan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan yang tinggi nyatanya masih belum cukup untuk menghindari fenomena yang terjadi seperti yang dilansir pada Tribun Jabar (<http://jabar.tribunnews.com> diakses pada 20 Januari 2019). Hal ini juga mengartikan bahwa mayoritas kalangan penduduk di kota Bandung sudah banyak yang menggunakan produk lembaga jasa keuangan namun belum semuanya

paham mengenai produk apa yang mereka gunakan dan mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai produk jasa lembaga keuangan tersebut sehingga lebih tergoda akan iming – iming dari investasi ilegal, bukan kepada lembaga keuangan sejenis modal sosial yang relatif lebih mudah dan aman. Padahal, jumlah dari lembaga keuangan resmi di kota Bandung telah mencapai 274 unit yang dijelaskan pada tabel 1.4 berikut.

**Tabel 1. 4 Data Lembaga Keuangan Kota Bandung 2016**

No	Rincian	Jumlah
1	Bank Pemerintah	4
2	Bank Swasta Nasional	48
3	Bank Asing dan Campuran	16
4	Bank Pembangunan Daerah	3
5	Bank Perkreditan Rakyat	29
6	Asuransi Jiwa	87
7	Dana Pensiun	11
8	Pegadaian	1
9	Perusahaan Pembiayaan	70
10	Modal Ventura	2
11	Lembaga Penjaminan	3
	Jumlah	274

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Regional 2 Jawa Barat)

Di Bandung sendiri sebenarnya sudah terdapat modal sosial yang telah dibentuk oleh OJK yang bekerjasama dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan mahasiswa yaitu “Program Edukasi Literasi Keuangan dengan Menggunakan Fasilitas Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK)” (tribunnews.com, 2014). Contoh modal sosial lainnya adalah kerjasama OJK dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) yang meliputi beberapa hal, seperti rencana pembuatan Pusat Riset Literasi dan Inklusi Keuangan (PRLIK), penyelenggaraan kuliah umum secara reguler, dan pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* yang

diperuntukkan khusus untuk mahasiswa (tribunnews.com, 2017). Dari program-program OJK diatas, terlihat bahwa sasarannya sudah spesifik kepada mahasiswa kota Bandung.

Untuk di Indonesia sendiri, modal sosial dapat berperan dalam mendukung peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan di masyarakat seperti diberitakan dalam majalah Gemari (2011) bahwa untuk memperkuat inklusi keuangan, Yayasan Damandiri membuat suatu program dengan kearifan lokal yang dihimpun dalam suatu kegiatan yang dinamakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yaitu program yang tidak hanya mengandalkan usaha pada penghimpunan dana tabungan atau kredit dengan bunga ringan, tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga dengan akses kredit yang lebih luas bagi keluarga miskin.

Modal sosial juga merupakan investasi sosial, yang meliputi sumber daya seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan yang menggerakkan, dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan pengaruhtif dengan kapital lainnya (Damsar, 2011: 211). Menurut Fukuyama (2000) modal sosial didefinisikan sebagai rangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama antara para anggotanya dalam suatu masyarakat sehingga memungkinkan terjalinnya kerjasama, artinya modal sosial yang dalam konteks ini didasarkan pada komponen *reciprocity*, *norms*, *trust* dan *network*.. Tambahan lagi, modal sosial adalah tentang solidaritas, kepercayaan diri, dan memfasilitasi dalam menjalankan suatu bisnis, yang merupakan faktor yang berasal dari hubungan sosial yang melibatkan keluarga, teman, rekan kerja, dan lain-lain (Felicio *et al.*,, 2014). Putnam (2000) berbagi pandangan yang sama dengan menyatakan bahwa modal sosial itu dapat secara positif memengaruhi hasil pendidikan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, modal sosial sebagai suatu dimensi yang dibangun berdasarkan nilai, kultur, persepsi, institusi serta mekanisme dalam kegiatan positif, yang akan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara perlahan di masyarakat sebagai sarana pemberdayaan terhadap sesama masyarakat. Hal tersebut tentu sudah tidak asing lagi dilakukan oleh mahasiswa khususnya di kota

Bandung yang memiliki kebiasaan untuk saling berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan sosialnya sehingga modal sosial bisa dikatakan sudah dimiliki oleh mahasiswa kota Bandung namun belum digunakan untuk peningkatan dari literasi keuangan dan inklusi keuangan yang mereka miliki.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti modal sosial adalah Bongomin *et al.*, (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa modal sosial sangat berperan penting dalam memediasi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan, terutama dalam mengakses layanan keuangan di masyarakat pedesaan Uganda. Kamukama dan Natamba (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa modal sosial secara parsial memediasi masyarakat untuk dapat mengakses ke layanan keuangan di Uganda. Penelitian-penelitian dahulu tersebut menjadi dasar pada penelitian ini.

Dengan demikian peneliti berharap peran modal sosial menjadi sarana penghubung yang akan mendukung peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan pada mahasiswa di kota Bandung. Dari kajian fenomena-fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Peran Modal Sosial Sebagai Mediator Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Pada Mahasiswa Kota Bandung”**. Beberapa penelitian sebelumnya berusaha menjelaskan tentang peran modal sosial sebagai mediator di Kota Bandung, tetapi penelitian tersebut masih tidak menjadikan mahasiswa Kota Bandung sebagai objek dalam penelitian secara umum.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Perbedaan angka Literasi dan Inklusi keuangan di Kota Bandung mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya mahasiswa Kota Bandung dalam memahami Literasi Keuangan dan meningkatkan Inklusi Keuangan. Dikarenakan peran literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan.

Khususnya dengan fenomena yang telah peneliti dapatkan, dengan dilihat juga dari tingginya tingkat inklusi keuangan di Kota Bandung menerangkan bahwa mahasiswa di Kota Bandung memiliki minat yang tinggi terhadap jasa keuangan,

namun mereka belum memahami lebih mengenai jasa – jasa lainnya yang ditawarkan oleh lembaga keuangan sehingga mengakibatkan angka literasi keuangan di Kota Bandung menjadi rendah, yang dibuktikan oleh ditemukannya artikel yang menyatakan masih maraknya investasi ilegal yang ada disana. Modal sosial yang telah ada dan terus dikembangkan oleh pemerintah serta elemen lainya yang berperan sebagai *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya mahasiswa mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan tersebut.

Beberapa studi terdahulu yang terkait dengan masalah modal sosial sebagai mediator literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadikan Indonesia secara umum sebagai objek studi kasus dalam penelitian. Melihat dari perbedaan geografi dan demografi, maka dalam studi ini mengambil mahasiswa kota Bandung sebagai objek yang perlu diteliti.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap peran modal sosial?
2. Apakah modal sosial memiliki pengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan ketika di teliti dengan modal sosial, dibandingkan dengan pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan tanpa modal sosial?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di jabarkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap peran modal sosial
2. Untuk mengetahui apakah modal sosial mempengaruhi tingkat inklusi keuangan

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan ketika di teliti dengan modal sosial, dibandingkan dengan pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan tanpa modal sosial

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti lain dengan topik pembahasan mengenai modal sosial, literasi keuangan dan inklusi keuangan.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai modal sosial dan literasi keuangan sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan sehari – hari serta untuk menyelesaikan tugas akhir yang telah diberikan kepada peneliti.

#### **2. Bagi Mahasiswa Kota Bandung**

Penelitian ini di harapkan dapat menyadarkan mahasiswa di kota Bandung mengenai peran modal sosial sebagai mediator, dan menambah pengetahuan mengenai literasi keuangan, sehingga dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Kota Bandung dimasa sekarang dan di masa yang akan datang yang juga bermanfaat bagi mereka.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Variabel Penelitian**

Variable independen dari penelitian ini adalah Literasi keuangan. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Inklusi keuangan, dengan variable mediasinya adalah modal sosial. Pertanyaan dalam variable penelitian ini di sesuaikan dengan keadaan objek penelitian.

### **1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah mahasiswa di perguruan tinggi atau universitas yang ada di kota Bandung.

## **1.8 Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi yang terdapat dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penelitian seperti berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum mengenai objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan dan pertanyaan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematis penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai *literature* penelitian yang berkaitan dengan tinjauan pustaka yang mendukung solusi dari permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini di paparkan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang dilakukan, pengumpulan data, populasi dan sampel, uji validitas, analisis data serta pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini diuraikan berdasarkan hasil dari olahan data sesuai metode yang digunakan, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan untuk permasalahan yang sudah dirumuskan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan dari bab – bab sebelumnya serta, saran yang di kemukakan oleh peneliti untuk perbaikan masalah di masa sekarang dan di masa yang akan datang.